

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Council of Europe Conference of Ministers Responsible for Spatial/Regional Planning (CEMAT)*, 1983, *European regional/spatial planning Charter - Torremolinos Charter*.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hasni, 2016, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kartasasmita, G., 1997, *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia)*, LP3ES, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Matti O. Hannikainen, 2016, *The Greening of London, 1920-2000*, Routledge, London.
- Moleong, Lexy J., 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 1992, *Metodologi Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta Utara.
- Tiasnaadmidjaja, D.A dan Yusuf, Asep Warlan, *Pranata Pembangunan*, 1997, Universitas Parahiayang, Bandung.

United Cities and Local Government, 2016, *UCLG Public Space Policy Framework By And For Local Government*, European Comission, Barcelona.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8).

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 38).

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 156 tahun 2012 tentang Penghematan Energi dan Air (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 153, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 154).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30).

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62066).

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Objek Pajak Bangunan Berupa Rumah Untuk Tahun Pajak 2019.

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

C. Jurnal

Vioya, Arrauda, "Tahapan Perkembangan Kawasan Metropolitan Jakarta", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 21 No. 3, Desember 2010.

D. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2017, *Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017*.

Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, *Executive Summary Masterplan Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta 2018-2038*.

Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, *Laporan Akhir Masterplan Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta 2018-2038*.

Fam, D., Mosley, E., Lopes, A., Mathieson, L., Morison, J., & Connellan, G., "Irrigation of Urban Green Spaces: a review of the Environmental, Social and Economic benefits". *Cooperative Research Centre for Irrigation Future*, 2008.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Executive Summary Roadmap Kota Hijau*.

P2KH, 2015, *8 Atribut Kota*.

Rakhshandehroo, Mehdi, Johari, Mohd, Yusof, Mohd, "Terminology of Urban Open and Green Space", *Conference: 11th ASEAN Postgraduate Seminar, APGS 2017, at Faculty of Built Environment, University of Malaya, Malaysia, 2017*.

Swanwick, C., Dunnett, N. and Woolley, H., "Nature, role and value of green spaces in towns and cities: an overview.", *Built Environment*, 29 (2), 2003.

Taylor, Lucy, Hochuli, Dieter F., "Defining greenspace: Multiple uses across multiple disciplines", *Landscape and Urban Planning* 158 25–38, 2017.

E. WEBSITE

Eldo Christoffel Rafael, *Greenpeace: Buruknya kualitas udara Jakarta, bergantung komitmen pemerintah daerah*, <https://regional.kontan.co.id/news/greenpeace-buruknya-kualitas-udara-jakarta-bergantung-komitmen-pemerintah>,

Jakarta air quality index (AQI) and PM2.5 air pollution <https://www.airvisual.com/indonesia/jakarta>, diakses, pada tanggal 26 Juli 2019.



KumparanSAINS, *Pagi ini Jakarta Jadi Kota dengan Polusi Udara Terburuk di Dunia*, diakses dari <https://kumparan.com/@kumparansains/pagi-ini-jakarta-jadi-kota-dengan-polusi-udara-terburuk-di-dunia-1rLLmGen39i>, diakses pada tanggal 6 Juli 2019.

Program Pengembangan Kota Hijau, <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/program-pengembangan-kota-hijau>, diakses, pada tanggal 26 Juli 2019.

Program Pengembangan Kota Hijau, <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/program-pengembangan-kota-hijau>, diakses, pada tanggal 26 Juli 2019.

Project for Public Spaces, "What Is Placemaking?", <https://www.pps.org/article/what-is-placemaking>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019.

Sulistiono, *Gelora Bung Karno Milik Siapa? Kisah Otonomi Daerah*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7888/font-size1-colorff0000bgelora-bung-karno-milik-siapabfontbrkisah-otonomi-daerah-/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019.